



bkpsdm
Kabupaten
Tasikmalaya

Rencana Kerja

Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tasikmalaya

2026





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

JL. Mayor SL. Tobing Nomor 56 Telp./Fax. (0265) 330171
website : bkpsdm.tasikmalayakab.go.id email : bkpsdm@tasikmalayakab.go.id
TASIKMALAYA - 46181

KEPUTUSAN KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : 000.7.2.4/KEP. 0854/SEKRE/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2026

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Bupati Tasikmalaya Nomor 0004 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri. Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 07 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya 2021-2026;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 12)
17. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 28 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Rincian Tugas Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 04 Februari 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN TASIKMALAYA



Drs. IING FARID KHOZIN, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660304 199403 1 006

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN
TASIKMALAYA
NOMOR : 000.7.2.4/KEP. 0854 /SEKRE/2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2026.

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2026

Ketua : Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya.

Wakil Ketua : Sekretaris Badan Kepegawaian Dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya.

Sekretaris : Perencana Ahli Muda pada Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Tasikmalaya.

Anggota : 1. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan
Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Tasikmalaya.

2. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Tasikmalaya.

3. Kepala Bidang Mutasi dan Promosi Badan Kepegawaian
Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Tasikmalaya.

4. Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan
Penghargaan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya.

5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan
Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Tasikmalaya.

6. Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Tasikmalaya.

7. Widyaiswara Ahli Madya Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Tasikmalaya.

8. Analis SDM Aparatur Ahli Muda Badan Kepegawaian
Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Tasikmalaya.

9. Asesor SDM Aparatur Ahli Muda Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Tasikmalaya.

10. Analisis perencanaan, evaluasi dan pelaporan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya.
11. Pengelola bahan perencanaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN TASIKMALAYA



Drs. HING FARID KHOZIN, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660304 199403 1 006

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN
TASIKMALAYA
NOMOR : 000.7.2.4/KEP. 0854 /SEKRE/2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2026.

RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2026

1. KETUA

- a. Bertanggungjawab terhadap aktivitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim penyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya;
- b. Memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya;
- c. Menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun kepada Bupati Tasikmalaya;
- d. Bertanggungjawab sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan.

2. SEKRETARIS

- a. Mengkoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim penyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya;
- b. Membantu penanggungjawab dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya;
- c. Mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun kepada penanggungjawab;
- d. Bertanggungjawab sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan.

3. ANGGOTA

- a. Mereviu hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya tahun lalu berdasarkan Renstra;
- b. Melakukan analisis terhadap pencapaian dan perencanaan kinerja program/kegiatan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026;
- c. Melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya;

- d. Melakukan telaahan terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026;
- e. Merumuskan tujuan, sasaran dan program kegiatan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026;
- f. Merumuskan kegiatan prioritas Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026;
- g. Menyesuaikan penyempunaan dokumen Rancangan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 sesuai dengan RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 yang telah ditetapkan; dan
- h. Bertanggungjawab sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN TASIKMALAYA



Drs. IING FARID KHOZIN, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660304 199403 1 006

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT yang dengan kudrot-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026.

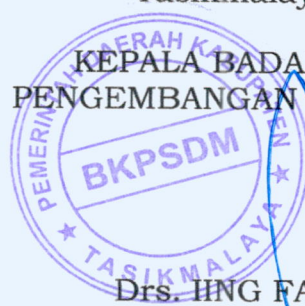
Rencana Kerja Tahun 2026 memuat kebijakan pembangunan yang diaplikasikan ke dalam program kerja, kegiatan dan sub kegiatan BKPSDM Tahun 2026 dengan mengacu pada hasil program dan kegiatan Tahun 2024 dan Tahun 2025 Triwulan II serta mempertimbangkan berbagai isu dan permasalahan yang mempengaruhi proses pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. BKPSDM Kabupaten Tasikmalaya menetapkan program kerja Tahun 2026 sehingga memiliki sinergitas yang berkesinambungan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran BKPSDM, sebagai kontribusi pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya.

Semoga dengan tersusunnya Rencana Kerja ini menjadi upaya nyata guna meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran yang lebih akuntabel dengan penetapan sasaran-sasaran strategis dan ukuran-ukuran kinerja yang jelas.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak, atas segala bantuan dan dukungannya, sumbang saran serta kritik yang membangun sehingga tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2026 ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Tasikmalaya, 25 Agustus 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,



Drs. ING FARID KHOZIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660304 199403 1 006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan	I-5
1.4 Sistematika Penulisan	I-6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN	
LALU	II-7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	II-7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-17
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	II-23
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	II-24
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-29
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	III-30
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	III-30
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	III-34
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT	
DAERAH	IV-37
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan BKPSDM Kabupaten Tasikmalaya.....	IV-37
BAB V PENUTUP	V-46
5.1 Catatan Penting.....	V-46
5.2 Kaidah-kaidah.....	V-46
5.2 Rencana Tindaklanjut	V-47

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Anggaran dan Realisasi Program TA. 2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	II-8
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Triwulan II 2025 Kabupaten Tasikmalaya	II-9
Tabel 2.3	Capaian Indikator Kinerja Utama BKPSDM Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024	II-18
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya	II-22
Tabel 2.5	Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2026	II-25
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran BKD Propinsi Jawa Barat 2024-2026	III-33
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran BPSDM Propinsi Jawa Barat 2024-2026	III-33
Tabel 3.3	Prioritas dan Sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya	III-35
Tabel 3.4	Tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya	III-35
Tabel 3.5	Sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya	III-36
Tabel 4.1	Sasaran dan Program/Kegiatan BKPSDM	IV-38
Tabel 4.2	Rekapitulasi Program dan Kegiatan berdasarkan 10 (sepuluh) Prioritas Pembangunan Tahun 2026	IV-39
Tabel 4.3	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya	IV-41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah Tahun 2026 merupakan proses krusial dan strategis yang menjadi pondasi bagi seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Dokumen ini bukan sekadar formalitas, melainkan alat perencanaan yang esensial untuk memastikan efektivitas, akuntabilitas, dan sinkronisasi kinerja perangkat daerah dengan tujuan pembangunan daerah.

Penyusunan Rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya merupakan Badan Tipe A yang melaksanakan fungsi sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan dalam pengelolaan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2026. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2026 juga disusun dengan memperhatikan realisasi anggaran Tahun 2024, perkiraan-perkiraan yang nyata tentang kebutuhan dan pelaksanaan

kebijakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya dalam kewenangannya yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan prioritas target sasaran yang hendak dicapai.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015.
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987).
7. Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7048).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026.
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

19. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
22. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Propinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026.
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Propinsi Jawa Barat Tahun 2026.
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 07 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya 2021-2026.
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 4).

28. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 12).
29. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
30. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 28 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya.
31. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026.
32. Surat Edaran Bupati Tasikmalaya Nomor 0004 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja BKPSDM Tahun 2026 adalah sebagai pedoman operasional dan perencanaan detail bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama satu Tahun anggaran 2026.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja BKPSDM Tahun 2026 adalah :

1. Penyelarasan dengan visi, misi dan sasaran pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Penerjemahan Sasaran dan Kebijakan ke dalam Program dan Kegiatan Konkret serta menginformasikan atau memberikan gambaran mengenai program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan di Tahun 2026 beserta dengan target dan indikator kinerja yang ingin dicapai oleh BKPSDM selama Tahun 2026.

3. Menyediakan tolok ukur yang jelas untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja BKPSDM dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
4. Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Pelayanan Publik.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 serta Surat Edaran Bupati Tasikmalaya Nomor 0004 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan BKPSDM Kabupaten Tasikmalaya

BAB V PENUTUP

- 5.1 Catatan Penting
- 5.2 Kaidah-kaidah
- 5.3 Rencana Tindaklanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Renstra Perangkat Daerah

Pengukuran dan evaluasi kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024. Pengukuran dan evaluasi kinerja dilakukan dengan cara menghitung penilaian atas keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dimaksud mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator. Selanjutnya dilakukan evaluasi kinerja dari pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pada tahun anggaran 2024, Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya mengalokasikan anggaran belanja daerah dengan struktur anggaran sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah

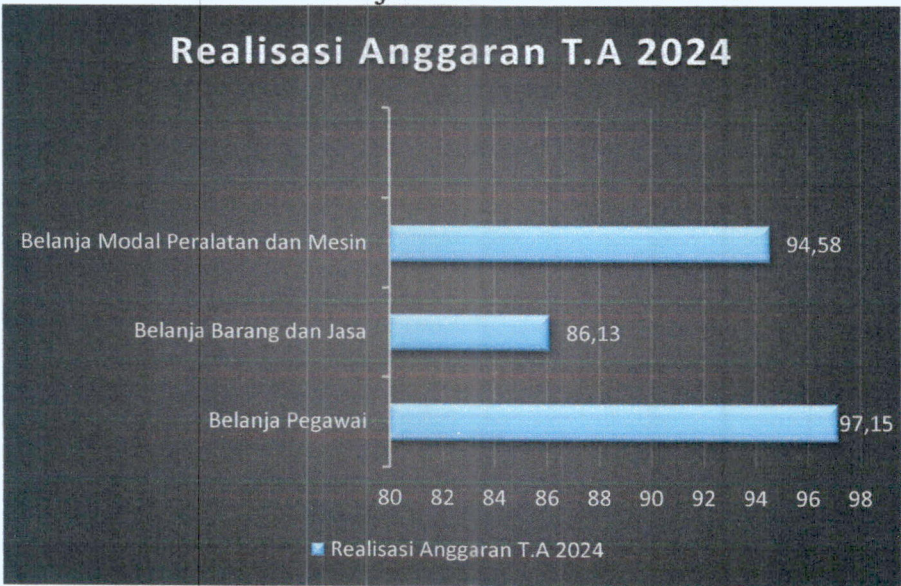
Retribusi Daerah targetnya sebesar Rp. 2.000.000,- dengan realisasi retribusi yang melebihi target anggaran yaitu sebesar Rp. 19.000.000,-

2) Belanja operasi dengan total anggaran sebesar Rp. 12.964.432.144,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 12.125.494.239,- atau sebesar 93.53% yang terdiri dari :

- Belanja pegawai sebesar Rp. 8.701.265.344,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.453.575.191,-
- Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 4.263.166.800,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.671.919.048,-

3) Belanja modal sebesar Rp.158.428.800,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 149.840.000,- atau 94.58%.

Gambar 2.1
Realisasi Belanja BKPSDM Tahun 2024



Dibawah ini ditampilkan tabel kesesuaian kinerja sasaran strategis, program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan

Tabel 2.1
Anggaran dan Realisasi Program TA. 2024
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Program yang mendukung	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN yang Profesional berdasarkan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	289 Poin	313 Poin	Kepegawaian Daerah	1.873.551.800	1.365.689.909
					Pengembangan Sumber Daya Manusia	996.780.000	968.997.959
2	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas perangkat daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	73 Poin	85,50 Poin	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	10.252.529.144	9.940.646.371
Jumlah						13.122.860.944	12.275.334.239

Sedangkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja BKPSDM dan pencapaian Renstra BKPSDM sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024
Kabupaten Tasikmalaya

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) 2021-2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2025	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Triwulan II	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan									
5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	76,49	82,00	80,00	82,00	107,00%	82,00	82,45	106%
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Perangkat Daerah	77,95	86,63	86,60	86,63	111,00%	86,70	91,10	117,00%
2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas dan terarah	92 Dokumen	71 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	100%	15 Dokumen	77 Dokumen	83,70%
0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36 Dokumen	29 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100%	8 Dokumen	31 Dokumen	86,11%
0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39 Laporan	25 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100%	7 Laporan	29 Laporan	74,36%
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	332 Orang	250 Orang	59 Orang/Bulan	59 Orang/Bulan	100%	59 Orang/Bulan	308 Orang	92,77%
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Penunjang Pelayanan	312 Paket	217 Paket	48 Paket	48 Paket	100%	48 Paket	241 Paket	77,24%
0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Paket	48 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	54 Paket	90%
0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	60 Paket	48 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	54 Paket	90%
0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	60 Dokumen	48 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	54 Dokumen	90%
0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	48 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	54 Laporan	90%
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
0006	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	268 Unit	53 Unit	23 Unit	23 Unit	100%	16 Unit	53 Unit	19,78%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) 2021-2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2025	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Triwulan II	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan Penghargaan	4.502 Orang	2.140 Orang	1.073 Orang	1.203 Orang	112%	1.669 Orang	2.473 Orang	54,93%
08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	5 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	4 Laporan	80,00%
5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan per tahun	18 JP/Orang/Tahun	15,10 JP/Orang/Tahun	15 JP/Orang/Tahun	15,10 JP/Orang/Tahun	101%	20 JP/Orang/Tahun	11,54 JP/Orang/Tahun	64,10%
2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis	6%	7,78%	6%	7,78%	7,78%	6%	2,63%	43,80%
01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	5 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	80,00%
03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	1.307 Orang	201 Orang	39 Orang	33 Orang	85%	2.194 Orang	222 Orang	16,99%
04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60,00%
2,02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional.	3%	3,23%	3%	3,23%	108,00%	3%	3,23%	107,00%
07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5 Laporan	3 Laporan	0	0	0%	1 Laporan	3 Laporan	60,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) 2021-2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2025	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Triwulan II	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	120 Laporan	96 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	100%	24 Laporan	108 Laporan	90%
0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	48 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	54 Laporan	90%
0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	48 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	54 Laporan	90%
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilakukan pemeliharaan	399 Unit	211 Unit	51 Unit	51 Unit	100%	57 Unit	217 Unit	54,39%
0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayar Pajaknya	119 Unit	90 Unit	22 Unit	22 Unit	100%	23 Unit	90 Unit	75,63%
0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	271 Unit	117 Unit	28 Unit	28 Unit	100%	32 Unit	121 Unit	44,65%
0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	4 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	2 Unit	6 Unit	66,67%
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Indeks Sistem Merit (3 aspek penilaian) Aspek Perencanaan Kebutuhan + Aspek Pengadaan + Aspek Sistem Informasi	96,5 Poin	94 Poin	88 Poin	94 Poin	107%	94 Poin	94 Poin	97%
		Indeks Sistem Merit (2 aspek penilaian) Aspek Pengembangan Karir + Aspek Mutasi dan Promosi	132,5 Poin	95 Poin	77,5 Poin	95 Poin	119,00%	95 Poin	95 Poin	72%
		Indeks Sistem Merit (3 aspek penilaian) Aspek Manajemen Kinerja + Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin + Aspek Perlindungan dan Pelayanan	128,5 Poin	124 Poin	123,5 Poin	124 Poin	102%	124 Poin	124 Poin	96%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) 2021-2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2025	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Triwulan II	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Indeks Sistem Merit (3 aspek penilaian) Aspek Perencanaan Kebutuhan + Aspek Pengadaan + Aspek Sistem Informasi	96,5 Poin	94 Poin	88 Poin	94 Poin	107%	94 Poin	94 Poin	97%
		Rasio Pegawai Fungsional	22,50%	22,88%	20,70%	22,88%	110,00%	23,06%	22,55%	100,20%
03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	5 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	80%
06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	5 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	80%
10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	80%
2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Nilai Sistem Merit Aspek Mutasi dan Promosi ASN	30 Poin	20 Poin	17,5 Poin	17,5 Poin	114%	20 Poin	20 Poin	67%
		Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi	100%	100%	100%	74%	74%	75%	73,92%	98,56%
01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana, dan Mutasi ASN antar Daerah	5 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	4 Dokumen	80%
02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	10 Dokumen	8 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	2 Dokumen	8 Dokumen	80%
03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	3 Dokumen	60%
2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Nilai Sistem Merit Aspek Pengembangan Karir	102,5 Poin	75 Poin	60 Poin	75 Poin	121,00%	75 Poin	75 Poin	73,2%
		Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS Tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	87,8%	84,45%	100%	84,45%	84,45%	85%	85,17%	97,00%
02	Pengelolaan Assesment Center	Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator yang mengikuti assesment	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	60%
04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang mendapatkan bantuan stimulan biaya pendidikan	525 Orang	57 Orang	0	0	0,00%	-	57 Orang	10,86%
2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Indeks Sistem Merit (3 aspek penilaian) Aspek Manajemen Kinerja + Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin + Aspek Perlindungan dan Pelayanan	128,5 Poin	124 Poin	123,5 Poin	124 Poin	102%	124 Poin	124 Poin	96%
02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	80,00%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2024 capaian indikator kinerja utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya telah melampaui target yang diharapkan, begitupun pada capaian kinerja indikator kinerja program baik program kepegawaian daerah, program pengembangan sumber daya manusia ataupun program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.

Capaian indeks sistem merit Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 dapat melampaui target yang diharapkan, hal ini tidak lepas dari faktor-faktor keberhasilan yang mempengaruhi serta berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia diantaranya :

1. Pelaksanaan pengadaan PNS dan PPPK yang transparan berbasis Computer Assisted Test (CAT).
2. Pengelolaan dan Pengembangan aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG).
3. Peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi kepegawaian diantaranya dengan telah dikembangkannya fitur pengelolaan gaji berkala (KGB) terintegrasi SIMPEG.
4. Penyelenggaraan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama.
5. Pembangunan aplikasi talenta.
6. Penyusunan dan penetapan kebijakan atau Peraturan Bupati tentang mutasi pegawai dan manajemen talenta.
7. Pengelolaan penilaian kinerja pegawai.

Namun pada indikator kegiatan ada beberapa yang tidak mencapai target yang diharapkan yaitu pada indikator “rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi”. Dari target 100% baru terealisasi sebesar 74,01%. Begitupun dengan indikator kinerja kegiatan “rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (PNS tidak termasuk guru dan kesehatan) dari target sebesar 100% baru terealisasi sebesar 84,45%.

Meskipun target kinerja utama di Tahun 2024 telah tercapai namun Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya terus melakukan upaya-upaya perbaikan dengan menindaklanjuti rekomendasi pelaksanaan sistem merit di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Realisasi indikator kinerja Program Pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan per tahun juga telah melampaui target yang telah ditetapkan, dari target 15 JP/orang/tahun tercapai sebesar 15,10 JP/orang/tahun sehingga capaiannya sebesar 101%. Hal ini karena di Tahun 2024 telah dilaksanakan berbagai upaya pengembangan kompetensi diantaranya :

1. Telah diselenggarakannya Pendidikan dan Pelatihan Kepamongprajaan Bagi Pejabat Administrator/Camat se Kabupaten Tasikmalaya dengan peserta sebanyak 33 orang.
2. Pelaksanaan PKN Tk. II yang dilaksanakan di BPSDM Provinsi dengan jumlah 4 orang peserta.
3. Pelaksanaan Webinar diantaranya :
 - Webinar tentang Membangun peran dan kesadaran ASN dalam sikap perilaku bela negara dengan jumlah peserta 3.290 orang.
 - Webinar tentang Strategi komunikasi efektif serta membangun tim efektif dalam mewujudkan tujuan organisasi Pemerintah dengan jumlah peserta 1.892 orang.
 - Bimtek Rekonsiliasi Data Pengembangan Kompetensi Tahun 2024 melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dengan jumlah peserta 1.598 orang.
 - Webinar tentang Urgensi Kesehatan Mental Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan As-Sunnah Untuk Peningkatan Kualitas Kerja ASN dengan jumlah peserta 2.725 orang.
 - Webinar tentang Sosialisasi Pokok-Pokok Manajemen ASN Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja 2.775 orang.

- Webinar WASN Belajar dengan Tema: Pelatihan Percepatan Transformasi Satuan Pendidikan SMP dengan jumlah peserta 150 orang.
- Coaching Clinic Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pada e-Kinerja BKN Tahun 2024 dengan jumlah peserta 2.571 orang.
- Webinar ASN Belajar dengan Tema : Pembentukan Produk Hukum Daerah dengan jumlah peserta 4.956 orang.
- Webinar ASN Belajar dengan Tema : Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan jumlah peserta 1.231 orang.
- Webinar tentang Program Jaminan Kesehatan bagi Pegawai ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan jumlah peserta 4.035 orang.
- Webinar tentang Pengelolaan Arsip Dinamis dengan jumlah peserta 3.045 orang.
- Coaching Clinic Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pada eKinerja BKN dengan jumlah peserta 4.038 orang.

Untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, capaian kinerja indikatornya telah melampaui target yang telah ditetapkan sehingga diperlukan penyesuaian target pada dokumen perencanaan tahun berikutnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Berdasarkan pedoman di atas, pencapaian target kinerja BKPSDM Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 diukur dengan membandingkan target kinerja yang ditetapkan dengan realisasinya dalam perjanjian kinerja antara Kepala Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya dengan Bupati Tasikmalaya. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya di Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
 Capaian Indikator Kinerja Utama
 BKPSDM Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN yang Profesional berdasarkan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	289	313	108,30%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas perangkat daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	73	85,50	117,12%

Dari tabel diatas, Capaian indeks sistem merit Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 telah melampaui target yang diharapkan, hal ini tidak lepas dari faktor-faktor keberhasilan yang mempengaruhi serta berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia diantaranya :

1. Adanya kebijakan dan komitmen Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya untuk membentuk tim percepatan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi langkah-langkah penataan/perbaikan aspek-aspek yang terkait dengan pelaksanaan sistem merit dari Komisi Aparatur Sipil Negara serta mendukung pembangunan talenta.
2. Melaksanakan koordinasi dengan BKPSDM Kabupaten Sumedang.
3. Telah ditetapkannya kebijakan atau Peraturan Bupati tentang mutasi pegawai dan manajemen talenta..
4. Pembangunan aplikasi talenta. .

Begitu juga dengan indikator kinerja sasaran “nilai reformasi birokrasi perangkat daerah” target sudah terlampaui, hasil evaluasi reformasi birokrasi di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia diperoleh nilai sebesar **85,50** poin dengan **predikat “A” (Sangat Baik)** sehingga capaian kinerja sasaran ini adalah sebesar **117,12% (predikat “Sangat Baik”)**.

Beberapa faktor yang mendukung tercapainya target kinerja nilai reformasi birokrasi perangkat daerah diantaranya :

1. Adanya kebijakan dan komitmen Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya untuk membentuk tim percepatan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi langkah-langkah penataan/perbaikan reformasi birokrasi di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pelaksanaan praktek baik berupa optimalisasi pelayanan pensiun Pegawai Negeri Sipil yang manfaatnya dirasakan sangat besar oleh seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini tentu saja mendongkrak perolehan nilai reformasi birokrasi BKPSDM Tahun 2024.
3. Telah dilaksanakannya penancangan Pembangunan zona integritas di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
4. Optimalisasi penggunaan produk dalam negeri dalam setiap pengadaan barang dan jasa.
5. Pengelolaan dan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat baik dalam LAPOR, Instagram dan berbagai sarana pengaduan lainnya.

Sedangkan untuk capaian IKK, dari 3 IKK yang menjadi tanggung jawab Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ada 2 IKK yang tidak mencapai target yaitu Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) dan rasio Pegawai

Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS Tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan).

Capaian kinerja outcome Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi sebagai berikut :

- ✓ Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi
- ✓ Seluruh jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Kabupaten Tasikmalaya

Capaian kinerja rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi adalah sebesar 74,01%, masih dibawah target yang diharapkan, hal ini karena masih terdapat 112 pegawai fungsional yang belum memiliki sertifikat kompetensi, diantaranya adalah pejabat fungsional hasil penyetaraan sesuai Permenpan 17 Tahun 2021 dan pegawai PNS jabatan fungsional yang sesuai dengan formasi Pengadaan CPNS.

Berdasarkan PP no. 17 Tahun 2020 bahwa Pengangkatan pertama Jabatan Fungsional harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) berstatus PNS;
- b) memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c) sehat jasmani dan rohani;
- d) berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau setara sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
- e) nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
- f) syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

Dari keterangan diatas, tidak ada syarat uji kompetensi bagi pengangkatan pertama jabatan fungsional, sehingga masih banyak Pegawai Negeri Sipil angkatan baru yang belum memiliki sertifikat kompetensi.

Capaian kinerja Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS Tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) pada Tahun 2024 adalah sebesar 84,45% masih dibawah target yang diharapkan. Hal ini karena dari jumlah pegawai Pendidikan tinggi ke atas (PNS tidak termasuk guru dan

tenaga kesehatan) berjumlah 1.591 orang dari jumlah PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan berjumlah 1.884 orang. Dari data tersebut, terdapat 293 orang dengan Pendidikan SMA kebawah yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tasikmalaya

No	Indikator (IKU/SPM/IKK/SDG's)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi	Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Indeks Sistem Merit	Poin	312	289	289	313	328	313	313	328	IKU PD
2	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	61	62	73	76	86,62	85,50	86,18	86,62	IKU PD
3	Rasio Pegawai Fungsional	%	17,59	19,94	20,70	23,06	24,20	22,88	23,06	24,02	IKK
4	Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi	%	100	100	100	75	75	74,01	75	75	IKK
5	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS Tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	%	100	100	100	85	85	84,45	85	85	IKK
6	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	%	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	3,7	3,7	7,4	SDG's
7	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)	%	7,69	7,69	7,69	7,69	7,69	3,85	3,85	7,69	SDG's

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Analisis isu-isu strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah merupakan bagian penting karena dengan identifikasi isu yang tepat dan strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan.

Isu dan masalah strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM pada Rencana Kerja Tahun 2026 merupakan hasil dari evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan tugas pokok fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sampai dengan Tahun 2024, permasalahan yang timbul pada tahun-tahun sebelumnya serta berbagai tantangan yang harus dihadapi.

Dengan memperhatikan evaluasi kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025 sampai dengan triwulan II, permasalahan pembangunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya implementasi manajemen Aparatur Sipil Negara berdasarkan sistem merit. Hal tersebut berdasarkan hasil penilaian Indeks Sistem Merit. Indeks Sistem Merit Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2024 yaitu sebesar 313 poin.
2. Belum optimalnya sistem layanan dan informasi kepegawaian yang terintegrasi.
3. Belum optimalnya penerapan sistem manajemen talenta ASN untuk mendukung pelaksanaan rotasi, mutasi dan promosi.
4. Kompetensi pejabat dalam mengisi kekosongan jabatan pimpinan tinggi pratama karena memasuki purna tugas di Tahun 2026 yaitu :
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 - c. Asisten Administrasi Umum
 - d. Staf Ahli Bupati Tasikmalaya Bidang Pemerintahan dan Hukum

- e. Staf Ahli Bupati Tasikmalaya Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
- f. Inspektur Daerah
- g. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- h. Kesenjangan antara kebutuhan ASN berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dengan jumlah ASN yang tersedia.
- i. Belum dilaksanakannya *assesment* pegawai terhadap seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan standar kompetensi jabatan dan penyusunan profil pegawai berdasarkan kompetensi/talenta.
- j. Belum optimalnya pengembangan kompetensi bagi seluruh pegawai dalam menunjang Indeks Profesionalitas ASN. Pengembangan kompetensi belum dilaksanakan melalui sistem pembelajaran terintegrasi (ASN Corpu).

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2026 (pra Renja Tahun 2026), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya merencanakan untuk melaksanakan 3 program yang dijabarkan dalam 12 kegiatan dan 29 sub kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 16.442.493.216 (Enam belas milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus enam belas rupiah). Review terhadap rancangan awal RKPD selengkapnya akan ditampilkan dalam tabel 2.5 :

Tabel 2.5
Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2026

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2		3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
5.03.01	Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	BKPSDM	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	82,45 Poin	10.606.993.216	Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	BKPSDM	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	82,45 Poin	10.555.867.216	
				Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Perangkat Daerah	86,80 Poin					Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Perangkat Daerah	86,80 Poin		
2.01	Kegiatan	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPSDM	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas dan terarah	14 Dokumen	80.000.000	Kegiatan	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPSDM	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas dan terarah	100%	80.000.000	
0001	Sub Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BKPSDM	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	50.000.000	Sub Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BKPSDM	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	50.000.000	
0007	Sub Kegiatan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPSDM	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	30.000.000	Sub Kegiatan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPSDM	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	30.000.000	
2.02	Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BKPSDM	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	8.793.367.216	Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BKPSDM	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	8.827.313.133	
0001	Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BKPSDM	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 Orang/Bulan	8.793.367.216	Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BKPSDM	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/Bulan	8.777.313.133	
0005	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BKPSDM	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	50.000.000	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BKPSDM	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	30.000.000	
0008	Sub Kegiatan	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	BKPSDM	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	30.000.000	Sub Kegiatan	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	BKPSDM	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	20.000.000	
2.06	Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BKPSDM	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Penunjang Pelayanan	100%	450.776.000	Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BKPSDM	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Penunjang Pelayanan	100%	425.000.000	
0002	Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKPSDM	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	125.000.000	Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKPSDM	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	125.000.000	
0005	Sub Kegiatan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BKPSDM	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	14.500.000	Sub Kegiatan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BKPSDM	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	14.500.000	
0006	Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BKPSDM	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	30.500.000	Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BKPSDM	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	35.500.000	
0009	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKPSDM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	280.776.000	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKPSDM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	250.000.000	
2.07	Kegiatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BKPSDM	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	200.000.000	Kegiatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BKPSDM	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100.054.083	
0006	Sub Kegiatan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKPSDM	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	23 Unit	200.000.000	Sub Kegiatan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKPSDM	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	32 Unit	100.054.083	

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2		3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
2.08	Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKPSDM	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24 Laporan	666.350.000	Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKPSDM	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	670.000.000	
0002	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BKPSDM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	220.000.000	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BKPSDM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	220.000.000	
0004	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BKPSDM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	446.350.000	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BKPSDM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	450.000.000	
2.09	Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKPSDM	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53 Unit	416.500.000	Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKPSDM	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	453.500.000	
0001	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BKPSDM	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayar Pajaknya	23 Unit	225.048.000	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BKPSDM	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayar Pajaknya	23 Unit	225.000.000	
0006	Sub Kegiatan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKPSDM	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28 Unit	28.500.000	Sub Kegiatan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKPSDM	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	28.500.000	
0009	Sub Kegiatan	Pemeliharaan Rutin/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BKPSDM	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	162.952.000	Sub Kegiatan	Pemeliharaan Rutin/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BKPSDM	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200.000.000	
5.03.02	Program	Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM	Indeks Sistem Merit (3 aspek penilaian) Aspek Perencanaan Kebutuhan + Aspek Pengadaan + Aspek Sistem Informasi	94 Poin	2.810.000.000	Program	Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM	Indeks Sistem Merit (3 aspek penilaian) Aspek Perencanaan Kebutuhan + Aspek Pengadaan + Aspek Sistem Informasi	94 Poin	2.330.000.000	
				Indeks Sistem Merit (2 aspek penilaian) Aspek Pengembangan Karir + Aspek Mutasi dan Promosi	107,5 Poin					Indeks Sistem Merit (2 aspek penilaian) Aspek Pengembangan Karir + Aspek Mutasi dan Promosi	107,5 Poin		
				Indeks Sistem Merit (3 aspek penilaian) Aspek Manajemen Kinerja + Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin + Aspek Perlindungan dan Pelayanan	126,5 Poin					Indeks Sistem Merit (3 aspek penilaian) Aspek Manajemen Kinerja + Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin + Aspek Perlindungan dan Pelayanan	126,5 Poin		
2.01	Kegiatan	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	BKPSDM	Indeks Sistem Merit (3 aspek penilaian) Aspek Perencanaan Kebutuhan + Aspek Pengadaan + Aspek Sistem Informasi	94 Poin	775.000.000	Kegiatan	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	BKPSDM	Nilai sistem merit aspek Perencanaan Kebutuhan, aspek pengadaan dan sistem informasi	94 Poin	775.000.000	
				Rasio Pegawai Fungsional	24,20%					Rasio Pegawai Fungsional	24,20%		
0003	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	BKPSDM	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	650.000.000	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	BKPSDM	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	650.000.000	
0006	Sub Kegiatan	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	75.000.000	Sub Kegiatan	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	75.000.000	
0010	Sub Kegiatan	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	50.000.000	Sub Kegiatan	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	50.000.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)
1	2		3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
2.02	Kegiatan	Mutasi dan Promosi ASN	BKPSDM	Nilai Sistem Merit Aspek Mutasi dan Promosi ASN	20 Poin	785.000.000	Kegiatan	Mutasi dan Promosi ASN	BKPSDM	Nilai Sistem Merit Aspek Mutasi dan Promosi ASN	20 Poin	650.000.000	
				Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi	75%					Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi	75%		
0001	Sub Kegiatan	Pengelolaan Mutasi ASN	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana, dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	110.000.000	Sub Kegiatan	Pengelolaan Mutasi ASN	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana, dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	110.000.000	
0002	Sub Kegiatan	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	BKPSDM	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Dokumen	175.000.000	Sub Kegiatan	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	BKPSDM	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Dokumen	175.000.000	
0003	Sub Kegiatan	Pengelolaan Promosi ASN	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	500.000.000	Sub Kegiatan	Pengelolaan Promosi ASN	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	365.000.000	
2.03	Kegiatan	Pengembangan Kompetensi ASN	BKPSDM	Nilai Sistem Merit Aspek Pengembangan Karir	87,5 Poin	500.000.000	Kegiatan	Pengembangan Kompetensi ASN	BKPSDM	Nilai Sistem Merit Aspek Pengembangan Karir	87,5 Poin	405.000.000	
				Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS Tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	85%					Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS Tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	85%		
0003	Sub Kegiatan	Pengelolaan Assesment Center	BKPSDM	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assesment Center	1 Dokumen	500.000.000	Sub Kegiatan	Pengelolaan Assesment Center	BKPSDM	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assesment Center	1 Dokumen	405.000.000	
2.04	Kegiatan	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM	Indeks Sistem Merit (3 aspek penilaian) Aspek Manajemen Kinerja + Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin + Aspek Perlindungan dan Pelayanan	126,5 Poin	750.000.000	Kegiatan	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM	Nilai Sistem Merit Aspek Manajemen Kinerja, Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin serta Aspek Perlindungan dan Pelayanan	126,5 Poin	500.000.000	
0002	Sub Kegiatan	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	100.000.000	Sub Kegiatan	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	38.000.000	
0004	Sub Kegiatan	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	BKPSDM	Jumlah ASN yang diberikan Penghargaan	1.699 Orang	450.000.000	Sub Kegiatan	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	BKPSDM	Jumlah ASN yang diberikan Penghargaan	1.699 Orang	424.000.000	
0008	Sub Kegiatan	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	BKPSDM	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	200.000.000	Sub Kegiatan	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	BKPSDM	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	38.000.000	
5.04.02	Program	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan per tahun	20 JP/Orang/Tahun	3.025.500.000	Program	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan per tahun	20 JP/Orang/Tahun	2.050.000.000	
2.01	Kegiatan	Pengembangan Kompetensi Teknis	BKPSDM	Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis	12%	1.325.500.000	Kegiatan	Pengembangan Kompetensi Teknis	BKPSDM	Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis	12%	593.000.000	
0001	Sub Kegiatan	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	BKPSDM	Jumlah Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen	135.000.000	Sub Kegiatan	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	BKPSDM	Jumlah Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen	100.000.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)		
1	2		3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	
0003	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	BKPSDM	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	306 Orang	715.500.000	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	BKPSDM	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	1.040 Orang	234.000.000		
0004	Sub Kegiatan	Pembinaan, Penguodinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Penguodinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1 Dokumen	475.000.000	Sub Kegiatan	Pembinaan, Penguodinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	BKPSDM	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Penguodinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1 Dokumen	259.000.000		
2.02	Kegiatan	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	BKPSDM	Persentase ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional.	3,20%	1.700.000.000	Kegiatan	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	BKPSDM	Persentase ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional.	3,20%	1.457.000.000		
0007	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	BKPSDM	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan	1.700.000.000	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	BKPSDM	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan	1.457.000.000		
JUMLAH						16.442.493.216	JUMLAH						14.935.867.216	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 6 ayat 6 bahwa rencana pembangunan daerah harus bersifat partisipatif yaitu merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya telah memfasilitasi usulan program, kegiatan dan sub kegiatan dari masyarakat melalui kegiatan forum perangkat daerah BKPSDM. Forum perangkat daerah telah dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2025, namun dari hasil pelaksanaan forum perangkat daerah tersebut tidak terdapat usulan dari seluruh *stakeholder* yang hadir terkait dengan program, kegiatan dan sub kegiatan BKPSDM Tahun 2026.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang disusun berdasarkan pada tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Rencana Strategis Kementerian/lembaga maupun instansi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Adapun Kementerian/Lembaga dan instansi yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah KemenPAN dan RB, Badan Kepegawaian Negara dan BKD Propinsi Jawa Barat.

Saat ini baik KemenPAN dan RB dan Badan Kepegawaian Negara sedang menyusun Rencana Strategis 2025-2029 sehingga Rencana Kerja BKPSDM Tahun 2026 masih mengacu pada Renstra Kemen PAN dan RB serta BKN Tahun 2020-2024.

Visi KemenPAN dan RB adalah **“Mewujudkan Aparatur Negara yang Profesional dan Berintegritas Tinggi untuk Mencapai Pemerintahan yang Berkelas Dunia dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian yang Berlandaskan Gotong Royong”**. Dalam rangka mencapai visi tersebut, KemenPAN dan RB merumuskan dan menetapkan misi yang diemban yaitu :

1. Menciptakan Kelembagaan dan Tata Kelola Birokrasi yang Ramping, Lincah, Terintegrasi dan Berbasis Elektronik – digital bureaucracy.
2. Membangun SDM Aparatur yang Adaptif, Profesional, Kompetitif dan Berwawasan Global.
3. Mengembangkan Sistem Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel.

4. Menciptakan Sistem Pengawasan yang Profesional, Independen dan Berintegritas.
5. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel dan Melayani.
6. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Reformasi Birokrasi.

Dari visi dan misi KemenPAN dan RB Tahun 2020-2024, selanjutnya ditetapkan tujuan KemenPAN dan RB yaitu sebagai berikut:

1. Terwujudnya birokrasi yang berkualitas, kapabel dan berdaya saing.
2. Terwujudnya Kementerian PANRB yang berkualitas dan kapabel.

Selain Rencana Strategis KemenPAN dan RB, dokumen rencana strategis Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya juga merujuk pada Rencana Strategis BKN. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 81 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Kepegawaian Negara Tahun 2020-2024, visi Badan Kepegawaian Negara adalah **“Mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas untuk Mendukung Tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Rumusan misi yang ditetapkan Badan Kepegawaian Negara yakni meningkatkan kualitas ASN melalui:

1. Pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN,
2. Penyelenggaraan manajemen ASN
3. Penyimpanan informasi pegawai ASN
4. Pengawasan Dan Pengendalian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN
5. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistim manajemen internal BKN

Selanjutnya, berdasarkan visi dan misi tersebut ditetapkan pula tujuan Badan Kepegawaian Negara tahun 2020-2024 yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN Yang Berkualitas sebagai referensi pembinaan penyelenggaraan Manajemen ASN;
2. Mewujudkan Penyelenggaraan Manajemen ASN Berkualitas Prima sebagai sarana mewujudkan manajemen talenta nasional dalam rangka penyelenggaraan Manajemen ASN yang handal dan dinamis;
3. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Database dan Sistem Informasi ASN (SI-ASN) sebagai sarana penerapan sistem merit.
4. Mewujudkan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN.
5. Mewujudkan Tata Kelola Manajemen ASN BKN yang efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka mewujudkan visi & misi organisasi.

Rencana strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya juga merujuk pada Rencana Strategis BKD dan BPSDM Propinsi Jawa Barat.

Dalam upaya menjawab isu dan permasalahan dalam urusan pemerintahan bidang kepegawaian, meliputi pengadaan dan mutasi, pengembangan karir, kesejahteraan dan disiplin, pengelolaan sistem informasi kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah provinsi, maka tujuan jangka menengah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat adalah : **Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah.** Sasaran jangka menengah periode Tahun 2024-2026 yang ingin dicapai yaitu **Mewujudkan ASN yang Profesional, Berintegritas, Netral, dan Berkinerja Tinggi.**

Sasaran tersebut diukur keberhasilannya melalui 2 (dua) indikator, yaitu indikator pertama Indeks Sistem Merit dan indikator kedua Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Displin.

Target Indeks Sistem Merit yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
 Tujuan dan Sasaran BKD Propinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Exsisting 2022/ 2021	Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke		
					2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Mewujudkan ASN yang Profesional, Berintegritas, Netral, dan Berkinerja Tinggi	Indeks Sistem Merit	396,5/ 375,5	397,5	397,5	400
			Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kualifikasi(1), Kinerja (3), Disiplin (4)	54,63/ 30,13	54,69	54,74	54,79

BPSDM Provinsi Jawa Barat sebagai organisasi yang mempersiapkan aparatur Jawa Barat, dituntut agar mempersiapkan aparatur yang mampu bekerja dan meningkatkan kemampuan baik secara individu maupun kemampuan yang terkait dalam suatu organisasi. Dalam mencapai arah kebijakan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, BPSDM Provinsi Jawa Barat menetapkan 1 (satu) tujuan utama, yaitu **Terwujudnya ASN yang Profesional, Berintegritas, dan Sejahtera**. Adapun sasaran yang akan dicapai oleh BPSDM Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Mengacu pada tugas dan fungsi BPSDM Provinsi Jawa Barat serta arah kebijakan pembangunan daerah Jawa Barat, maka BPSDM Jabar sudah menetapkan 2 (dua) sasaran, diantaranya sebagai berikut :

Tabel 3.2
 Tujuan dan Sasaran BPSDM Propinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke		
				2024	2025	2026
1.	Terwujudnya ASN Yang Profesional, Berintegritas dan Sejahtera	Meningkatnya Kompetensi ASN	Indeks Profesionalisme ASN Dimensi Kompetensi	30	31	32

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke		
				2024	2025	2026
		Terselenggaranya Implementasi Corporate University	Indeks Implementasi Corporate University	C	B	A

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan sedang sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam dokumen Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa agenda-agenda yang dituangkan dalam RPJMD secara otomatis menjadi beban kerja dan tanggung jawab perangkat daerah melalui rancangan program dan kegiatan yang terukur pencapaian kinerjanya.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, urusan kewenangan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia meliputi urusan pengelolaan kepegawaian, pendidikan dan latihan. Berdasarkan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029, tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia tercantum pada **Misi kelima** yaitu **Mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih dan akuntabel.**

Adapun prioritas dan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Prioritas dan Sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah
1	Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya birokrasi yang adaptif dan berintegritas	Nilai Reformasi Birokrasi General (RB General)	Meningkatnya Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN	Indeks Sistem Merit
				Meningkatnya Profesionalitas ASN Kabupaten Tasikmalaya	Indeks Profesionalitas ASN
				Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian	Nilai Reformasi Birokrasi BKPSDM

Selanjutnya disajikan hubungan antara tujuan perangkat daerah dengan sasaran perangkat daerah dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 3.4
Tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tahun 2026
1	Mewujudkan ASN yang Profesional, Berintegritas dan Berkinerja Tinggi	Indeks Sistem Merit	328 Poin
		Indeks Profesionalitas ASN	81,60 Poin
		Nilai Reformasi Birokrasi BKPSDM	86,62 Poin

Tabel 3.5
 Sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
 Manusia Kabupaten Tasikmalaya

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran Tahun 2026
1	Meningkatnya Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN	Indeks Sistem Merit	328 Poin
2	Meningkatnya Profesionalitas ASN Kabupaten Tasikmalaya	Indeks Profesionalitas ASN	81,60 Poin
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian	Nilai Reformasi Birokrasi BKPSDM	86,62 Poin

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan BKPSDM Kabupaten Tasikmalaya

Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menuangkan tujuan dan sasaran strategis Renstra yang ingin dicapai ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan.

Usulan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tidak hanya mendukung pada visi misi Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya saja, namun harus sejalan dengan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDG's). SDG's merupakan sebuah program pembangunan dunia yang mana memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dunia dan melestarikan alam dengan terdapat 17 faktor utama sebagaimana tercapainya 169 target yang telah ditentukan dalam waktu yang telah disepakati. Dalam hal ini tujuan BKPSDM sejalan dengan tujuan SDG's khususnya pada tujuan nomor 5 dan 16. Tujuan 5 yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan dan tujuan 16 yaitu menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai (*peace*) untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkat.

Selain itu, usulan program kegiatan dan sub kegiatan juga harus mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG). PUG bukanlah suatu program atau kegiatan melainkan suatu strategi, strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk mencapai suatu keadilan gender sesuai dengan instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Nasional.

Pada Tahun 2026, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia akan melaksanakan 3 program yang dijabarkan dalam 12 kegiatan. Hasil perumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Sasaran dan Program/Kegiatan BKPSDM

No	Sasaran BKPSDM	Nama Program/Kegiatan
1	Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN yang profesional berdasarkan Sistem Merit	Program : Kepegawaian Daerah Kegiatan : 1. Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN 2. Mutasi dan Promosi ASN 3. Pengembangan Kompetensi ASN 4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
		Program : Pengembangan Sumber Daya Manusia Kegiatan : 1. Pengembangan Kompetensi Teknis 2. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
2	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan : 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan prioritas pembangunan Tahun 2026 yang terdiri dari 3 program yang akan dijabarkan dalam 12 kegiatan serta 29 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 14.935.867.216 (Empat Belas Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Enam Belas Rupiah) yang berasal dari APBD seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.2
Rekapitulasi Program dan Kegiatan
Berdasarkan 10 (sepuluh) Prioritas Pembangunan Tahun 2026

No	Prioritas Pembangunan	Nama Program/Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Keterangan
1	Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan	Kepegawaian Daerah	2.330.000.000	
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	775.000.000	
		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	650.000.000	DAU
		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	75.000.000	DAU
		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	50.000.000	DAU
		Mutasi dan Promosi ASN	650.000.000	
		Pengelolaan Mutasi ASN	110.000.000	DAU
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	175.000.000	DAU
		Pengelolaan Promosi ASN	365.000.000	DAU
		Pengembangan Kompetensi ASN	405.000.000	
		Pengelolaan Assessment Center	405.000.000	DAU
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	500.000.000	
		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	38.000.000	DAU
		Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	424.000.000	DAU
		Pengelolaan Penyelenggaraan Pelanggaran Disiplin ASN	38.000.000	DAU
		Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.050.000.000	
		Pengembangan Kompetensi Teknis	593.000.000	
		Penyusunan kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang dan urusan pemerintahan umum	100.000.000	DAU

No	Prioritas Pembangunan	Nama Program/Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Keterangan
		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	234.000.000	DAU
		Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	259.000.000	DAU
		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1.457.000.000	
		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1.457.000.000	DAU

Rumusan rencana program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	8	9	12	13	14	15	16	17	18	19	
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					14.935.867.216									
5	03	KEPEGAWAIAN					12.885.867.216									
5	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Perangkat Daerah			82,45 Poin 86,80 Poin	10.555.867.216								
5	03	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas dan terarah			100%	80.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Pemda Kab Tasikmalaya		
5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			7 Dokumen	50.000.000	Kab. Tasikmalaya	Dana Alokasi Umum				BKPSDM
5	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			7 Laporan	30.000.000	Kab. Tasikmalaya	Dana Alokasi Umum				BKPSDM
5	03	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%	8.827.313.133			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Pemda Kab Tasikmalaya		
5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			60 Orang/Bulan	8.777.313.133	Kab. Tasikmalaya	Dana Alokasi Umum				BKPSDM
5	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			2 Laporan	30.000.000	Kab. Tasikmalaya	Dana Alokasi Umum				
5	03	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			1 Dokumen	20.000.000	Kab. Tasikmalaya	Dana Alokasi Umum				
5	03	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Penunjang Pelayanan			100%	425.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Pemda Kab Tasikmalaya		
5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan			12 Paket	125.000.000	Kab. Tasikmalaya	Dana Alokasi Umum				BKPSDM
5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			12 Paket	14.500.000	Kab. Tasikmalaya	Dana Alokasi Umum				BKPSDM

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	8	9	12	13	14	15	16	17	18	19
5 03 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				12 Dokumen	35.500.000	Kab. Tasikmalaya	Dana Alokasi Umum						BKPSDM
5 03 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	250.000.000	Kab. Tasikmalaya	Dana Alokasi Umum						BKPSDM
5 03 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100%	100.054.083			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Pemda Kab Tasikmalaya			
5 03 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan				32 Unit	100.054.083	Kab. Tasikmalaya	Dana Alokasi Umum						BKPSDM
5 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				24 Laporan	670.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Pemda Kab Tasikmalaya			
5 03 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	220.000.000	Kab. Tasikmalaya	Dana Alokasi Umum						BKPSDM
5 03 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	450.000.000	Kab. Tasikmalaya	Dana Alokasi Umum						BKPSDM
5 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilakukan pemeliharaan				100%	453.500.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan				
5 03 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayar Pajaknya				23 Unit	225.000.000	Kab. Tasikmalaya	Dana Alokasi Umum						BKPSDM
5 03 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				32 Unit	28.500.000	Kab. Tasikmalaya	Dana Alokasi Umum						BKPSDM
5 03 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	200.000.000	Kab. Tasikmalaya	Dana Alokasi Umum						BKPSDM

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	8	9	12	13	14	15	16	17	18	19
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Sistem Merit (3 aspek penilaian) : Aspek Perencanaan Kebutuhan + Aspek Pengadaan + Aspek Sistem Informasi				94 Poin	2.330.000.000								
		Indeks Sistem Merit (2 aspek penilaian) : Aspek Pengembangan Karir + Aspek Mutasi dan Promosi				107,5 Poin									
		Indeks Sistem Merit (3 aspek penilaian) : Aspek Manajemen Kinerja + Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin + Aspek Perlindungan dan Pelayanan				126,5 Poin									
5 03 02 2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Indeks Sistem Merit (3 aspek penilaian) : Aspek Perencanaan Kebutuhan + Aspek Pengadaan + Aspek Sistem Informasi Rasio Pegawai Fungsional				94 Poin 24,20%	775.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan				
5 03 02 2.01 0003	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				1 Dokumen	650.000.000	Kab. Tasikmalaya	Dana Alokasi Umum						BKPSDM
5 03 02 2.01 0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				1 Dokumen	75.000.000	Kab. Tasikmalaya	Dana Alokasi Umum						BKPSDM
5 03 02 2.01 0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	50.000.000	Kab. Tasikmalaya	Dana Alokasi Umum						BKPSDM
5 03 02 2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Nilai Sistem Merit Aspek Mutasi dan Promosi ASN Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi				20 Poin 75%	650.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan				
5 03 02 2.02 0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana, dan Mutasi ASN antar Daerah				1 Dokumen	110.000.000	Kab. Tasikmalaya	Dana Alokasi Umum						BKPSDM
5 03 02 2.02 0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				2 Dokumen	175.000.000	Kab. Tasikmalaya	Dana Alokasi Umum						BKPSDM
5 03 02 2.02 0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				1 Dokumen	365.000.000	Kab. Tasikmalaya	Dana Alokasi Umum						BKPSDM
5 03 02 2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Nilai Sistem Merit Aspek Pengembangan Karir Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS Tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)				87,5 Poin 85%	405.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan				
5 03 02 2.03 0002	Pengelolaan Assesment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assesment Center				1 Dokumen	405.000.000	Kab. Tasikmalaya	Dana Alokasi Umum						BKPSDM

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	8	9	12	13	14	15	16	17	18	19
5 03 02 2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Indeks Sistem Merit (3 aspek penilaian) : Aspek Manajemen Kinerja + Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin + Aspek Perlindungan dan Pelayanan				124 Poin	500.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan				
5 03 02 2.04 0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	38.000.000	Kab. Tasikmalaya	Dana Alokasi Umum						BKPSDM
5 03 02 2.04 0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan Penghargaan				1.699 Orang	424.000.000	Kab. Tasikmalaya	Dana Alokasi Umum						BKPSDM
5 03 02 2.04 0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				1 Laporan	38.000.000	Kab. Tasikmalaya	Dana Alokasi Umum						BKPSDM
5 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan				20 JP/Orang/tahun	2.050.000.000								
5 04 02 2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis				12%	593.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan				
5 04 02 2.01 0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun				1 Dokumen	100.000.000	Kab. Tasikmalaya	Dana Alokasi Umum						BKPSDM
5 04 02 2.01 0003	Penyelenggaraan – Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				1.040 Orang	234.000.000	Kab. Tasikmalaya	Dana Alokasi Umum						BKPSDM
5 04 02 2.01 0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				1 Dokumen	259.000.000	Kab. Tasikmalaya	Dana Alokasi Umum						BKPSDM

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	8	9	12	13	14	15	16	17	18	19
5 04 02 2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional.				3,2%	1.457.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judl, dan penyeludupan	Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan				
5 04 02 2.02 0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				1 Laporan	1.457.000.000	Kab. Tasikmalaya	Dana Alokasi Umum						BKPSDM

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja disusun agar pelaksanaan program dan kegiatan lebih terkoordinasi dan sinergis untuk pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya ini dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dan APBD Tahun 2026.

5.1 Catatan Penting

Pada Tahun 2026, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya memiliki prioritas yakni sub kegiatan **Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai** dengan anggaran sebesar **Rp. 424.000.000** (Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Rupiah) serta sub kegiatan **Pengelolaan Assesment Center** dengan anggaran sebesar **Rp. 405.000.000** (Empat Ratus Lima Juta Rupiah). Selain kegiatan prioritas dimaksud, dilaksanakan pula kegiatan-kegiatan yang mendukung dalam pencapaian target IKU serta indikator kinerja lain Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya.

5.2 Kaidah-kaidah

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026, memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut :

1. Memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja 2025 Triwulan II;
2. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
3. Memperhatikan tujuan dan sasaran yang dikehendaki;

4. Kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaannya;
5. Memperhatikan keberlanjutan untuk menjaga konsistensi pembangunan.

5.3 Rencana Tindaklanjut

Pencapaian pelaksanaan target yang direncanakan dalam realisasinya tentunya ada yang tidak sesuai target atau disisi lain dapat melebihi target yang telah ditetapkan. Untuk itu, diperlukan evaluasi target kinerja dan anggaran untuk menentukan rencana tindaklanjut sebagai bahan perencanaan pelaksanaan kinerja program kegiatan pada tahun yang akan datang agar terlaksana sesuai target yang diharapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada 25 Agustus 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,



Drs. HING FARID KHOZIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660304 199403 1 006